

ANALISIS KEBERADAAN TRADEOFF INFLASI DAN PENGANGGURAN (KURVA PHILLIPS) DI INDONESIA

Abstract

Inflasi dan pengangguran adalah masalah pelik yang selalu dihadapi oleh Negara Indonesia terkait belum berkualitاسnya pertumbuhan ekonomi. Kurva Phillips yang menggambarkan tradeoff antara inflasi dan pengangguran tidak berlaku di Indonesia. Kecenderungan yang sesuai dengan kurva Phillips didapatkan dari hubungan antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Antara pengangguran dengan inflasi tidak dapat diprioritaskan mana yang akan ditangani terlebih dahulu, semuanya tergantung pada kondisi perekonomian. Penanggulangan pengangguran merupakan komitmen nasional serta dibutuhkan kebijakan makro dan mikro dalam penanganannya.

A. Latar Belakang

Inflasi dan pengangguran adalah masalah jangka pendek dalam perekonomian. Inflasi sendiri diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa inflasi yang terjadi pada suatu negara dapat digunakan sebagai indikator baik buruknya perekonomian suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebut hiperinflasi (*hyper inflation*).

Tujuan negara membangun adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka masalah pengangguran yang tinggi merupakan kondisi yang sangat tidak dikehendaki oleh suatu negara di manapun. Inflasi dan pengangguran adalah dua masalah ekonomi yang utama yang sering dihadapi oleh masyarakat suatu negara. Jika masalah inflasi dan pengangguran tidak terkendali, maka kedua masalah tersebut dapat mewujudkan efek buruk baik yang bersifat ekonomi, sosial, politik serta lingkungan dan budaya. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin ditimbulkan oleh kedua masalah tersebut, secara sederhana yakni secara ekonomi makro diperlukan berbagai kebijakan ekonomi yang komprehensif. Dalam teori kurva Phillips, pengangguran yang tinggi memang akan cenderung mengurangi inflasi. Namun yang menarik di Indonesia fenomena yang sering terjadi adalah ketika pengangguran tinggi tingkat inflasi juga masih tetap tinggi. Padahal, tujuan yang selalu dikehendaki untuk kedua masalah tersebut adalah rendah.

B. Inflasi, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian inflasi secara umum diartikan sebagai kenaikan harga-harga umum secara terus menerus selama dalam suatu periode tertentu. Dengan demikian beberapa unsur dalam pengertian inflasi perlu diketahui bahwa : (1) inflasi merupakan proses kecenderungan kenaikan harga-harga umum barang-barang dan jasa secara terus menerus. (2) kenaikan harga barang-barang ini tidak berarti harus naik dengan persentase yang sama, yang penting terdapat kenaikan harga-harga umum barang secara terus menerus selama periode tertentu (satu bulan atau satu tahun). (3) jika kenaikan harga hanya sekali saja dan bersifat sementara atau secara temporer (sekalipun dalam persentase yang besar) tetapi tidak berdampak meluas bukanlah merupakan inflasi¹.

Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Kondisi pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal yang dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik².

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan suatu negara, khususnya dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

1 Prasetyo, Eko. 2009. *Fundamental Makroekonomi*. Beta Offset. Yogyakarta.

2 Alghofari, Farid. 2010. *Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007*. Undip.

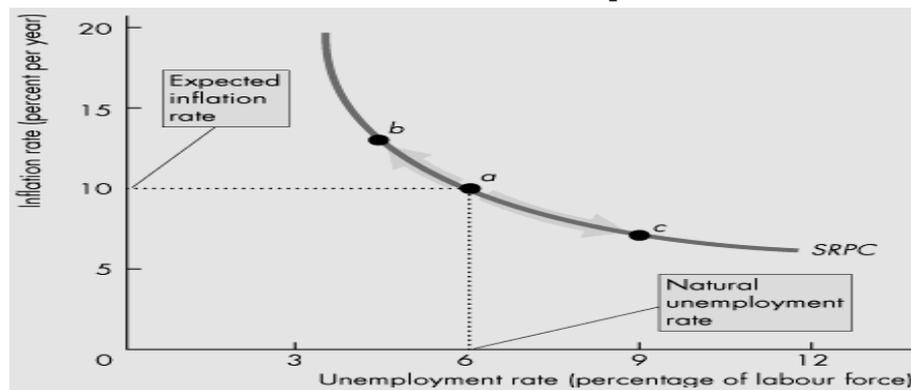
diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk lingkup nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk lingkup wilayah. Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dipengaruhi faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Secara internal, tiga komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

C. Kurva Phillips

Hubungan terbalik (*tradeoff*) antara pengangguran dan inflasi disebut kurva phillips. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin rendah tingkat inflasi upah. Dalam hal ini pengangguran sebagai output dan menerjemahkan inflasi sebagai perubahan harga. Kondisi dimana secara simultan pengangguran tinggi dan diikuti inflasi yang tinggi disebut sebagai *stagflasi*³.

Adapun gambar kurva phillips adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kurva Phillips



A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran berkurang.

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Adapun data mengenai tingkat pengangguran dan inflasi di Indonesia dari tahun 1986 hingga 2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Inflasi, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1986-2014

³ Dornbusch, Fisher, Startz. 2008. Makroekonomi. McGraw-hill Companies, Inc. America, New York

Tahun	Inflasi (%)	Pengangguran (Juta Orang)	Jumlah Angkatan kerja (Juta orang)	Tingkat Pengangguran (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1986	8,83	1,82	67,2	2,71	
1987	8,9	1,82	69,4	2,62	
1988	5,47	2,04	71,56	2,85	5,7
1989	5,97	2,04	72,46	2,82	7,5
1990	9,53	1,91	75,02	2,55	7,4
1991	9,52	1,99	75,9	2,62	6,6
1992	4,94	2,14	78,03	2,74	6,1
1993	9,77	2,2	78,91	2,79	6,5
1994	9,24	3,64	83,32	4,37	7,5
1995	8,64	7,24	84,23	8,60	8,1
1996	6,47	4,28	87,83	4,87	7,8
1997	11,05	4,18	89,23	4,68	4,7
1998	77,63	5,05	92,34	5,47	-13,1
1999	2,01	6,03	94,85	6,36	0,79
2000	9,35	5,81	95,65	6,07	4,92
2001	12,55	8,01	98,81	8,11	3,44
2002	10,03	9,13	100,78	9,06	3,66
2003	5,06	9,94	102,75	9,67	4,1
2004	6,4	10,25	103,97	9,86	5,1
2005	17,11	11,9	105,86	11,24	5,6
2006	6,6	10,93	106,39	10,27	5,5
2007	6,59	10,01	109,94	9,10	6,3
2008	11,06	9,39	111,95	8,39	6,1
2009	2,78	8,96	113,83	7,87	4,63
2010	6,96	8,32	116,53	7,14	6,22
2011	3,79	7,7	117,37	6,56	6,49
2012	4,3	7,24	118,05	6,13	6,26
2013	8,38	7,39	118,19	6,25	5,78
2014	6,7	7,15	125,3	5,71	

Sumber : BPS, Bank Indonesia, diolah (Data Inflasi 2014 bulan Juni, Data pengangguran 2014 bulan Februari)

Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus menerus membengkak. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5 persen. Pada tahun 1998 tingkat pengangguran mulai di atas 5% hingga tahun 2014. Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (*gap*) yang makin membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi tidak saja jurang antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin

tinggi hingga tahun 2005 kemudian mulai menurun hingga tahun 2014 seperti terlihat pada Gambar 2 berikut.



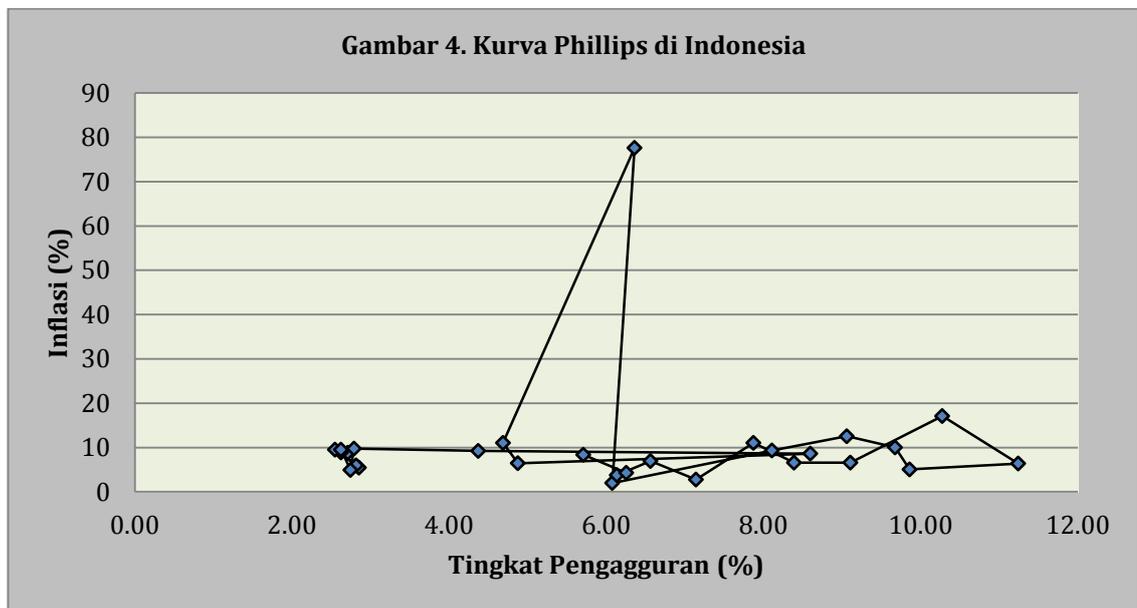
Inflasi Indonesia dari tahun 1986 hingga 2014 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 77,63% dan inflasi terendah pada tahun 1999 sebesar 2,01%.



Tingkat inflasi yang tinggi merupakan indikasi awal memburuknya perekonomian suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong bank sentral menaikkan tingkat suku bunga sehingga menyebabkan kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor riil. Lebih jauh lagi akan menyebabkan pengangguran yang makin meningkat. Dalam jangka pendek kenaikan inflasi menunjukkan pertumbuhan perekonomian namun dalam jangka panjang kenaikan inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak buruk. Tingginya tingkat inflasi menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga barang impor. Masyarakat terdorong untuk membeli barang impor dibandingkan barang domestik. Hal ini berakibat nilai ekspor cenderung turun dan nilai impor naik. Kurang bersaingnya harga produk domestik menyebabkan rendahnya permintaan produk dalam negeri. Produksi menjadi berkurang karena sejumlah pengusaha akan mengurangi produksi. Produksi berkurang

menyebabkan sejumlah pekerja kehilangan pekerjaannya sehingga pengangguran meningkat.

Bentuk kurva Phillips⁴ memiliki kemiringan menurun, yang menunjukkan hubungan negatif antara perubahan tingkat upah dan tingkat pengangguran, yaitu saat tingkat upah naik, pengangguran rendah, ataupun sebaliknya. Kurva Phillips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan, yang berarti bahwa jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi/tingkat pengangguran rendah, sebagai konsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. Adapun bentuk kurva Phillips Indonesia dengan adalah sebagai berikut .



Kurva Philips⁵ di atas menunjukkan bahwa di negara Indonesia hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran bukan lagi sebuah *tradeoff* melainkan berjalan searah, artinya inflasi yang tinggi juga diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amierrudin Saliem dengan data inflasi dan pengangguran Indonesia tahun 1976 hingga 2006 yang juga menunjukkan hubungan yang positif antara pengangguran dan inflasi. Inflasi sebagai bentuk kenaikan harga-harga di semua sektor, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan cara mengurangi pegawai atau tenaga kerja. Akibatnya, angka pengangguran yang tinggi tidak dapat dihindari dan berakibat perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Oleh karena itu, inflasi sangat berkaitan erat dengan tingkat pengangguran.

Adanya kenaikan harga-harga atau inflasi pada umumnya disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya naiknya Bahan Bakar Minyak

⁴ Kurva Phillips dibuat dengan membuat plot titik koordinat antara pengangguran dan inflasi

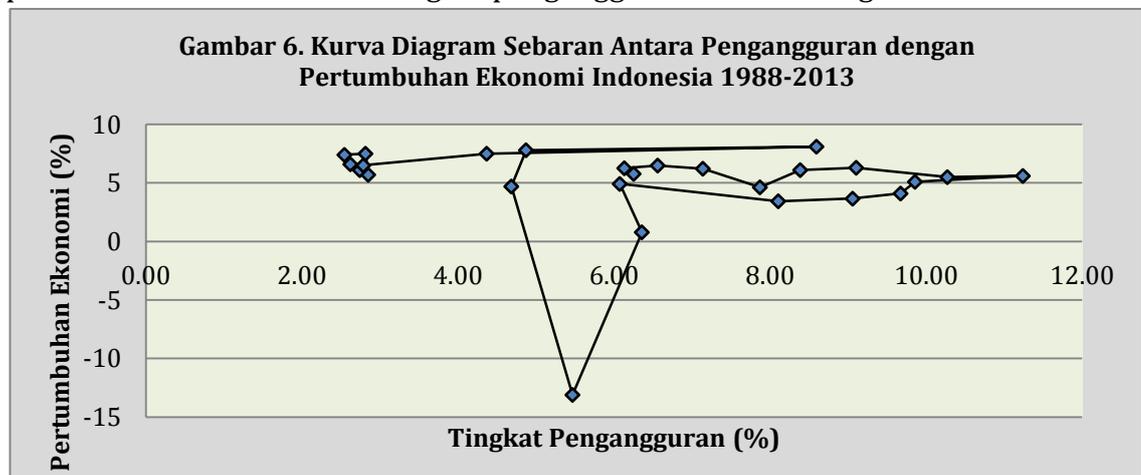
⁵ Data yang digunakan untuk membuat kurva Phillips di atas adalah data dari tahun 1986 hingga 2014

(BBM), bukan karena kenaikan permintaan. Kenaikan harga BBM ini pada akhirnya akan meningkatkan harga akibat kelangkaan pasokan dan gangguan distribusi di berbagai daerah. Dengan alasan inilah maka hubungan antara perubahan tingkat pengangguran dengan inflasi di Indonesia menyimpang dari teori kurva phillips. Alasan lainnya adalah bahwa dalam kurva Phillips hanya terjadi dalam jangka pendek tetapi tidak dalam jangka panjang. Karena pada jangka pendek masih berlaku harga kaku “*sticky price*” sedangkan pada jangka panjang berlaku harga fleksibel. Dengan kata lain pengangguran akan kembali pada tingkat alamiahnya sehingga hubungan yang terjadi antara inflasi dan pengangguran akan positif.

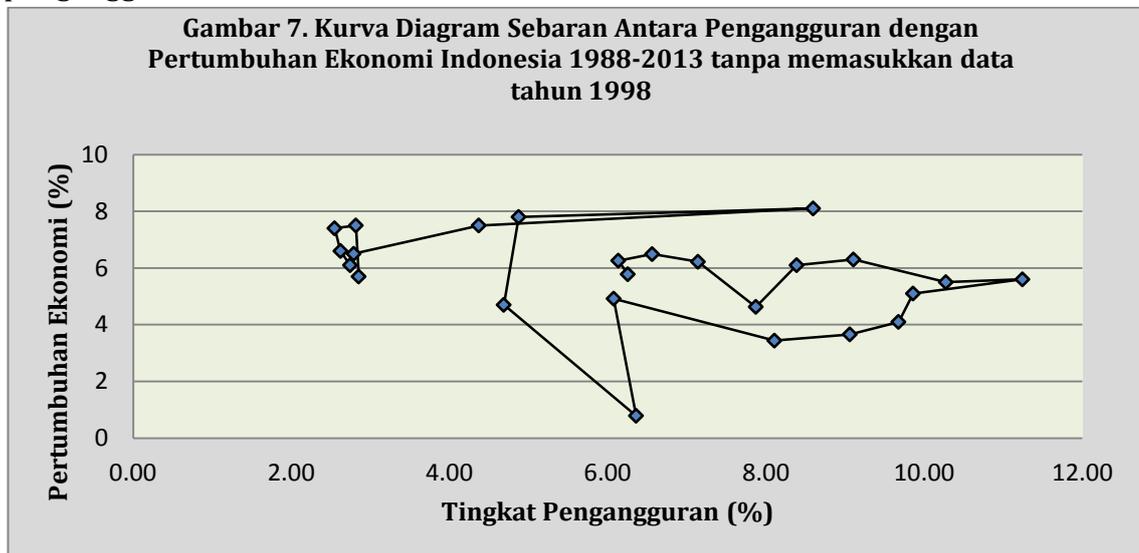
Perubahan tingkat pengangguran di Indonesia lebih tepat jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi merupakan akibat dari adanya peningkatan kapasitas produksi yang merupakan turunan dari peningkatan investasi. Dengan meningkatnya investasi pasti permintaan tenaga kerja akan bertambah, sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan adanya peningkatan investasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran.



Perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata dari tahun 1988 hingga 2013 adalah 4,99% dengan laju pertumbuhan terendah adalah pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis moneter. Adapun grafik hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran adalah sebagai berikut.



Dengan menggunakan data antara pengangguran dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti yang digunakan dalam membuat kurva Phillip (data tahun 1998 tidak digunakan karena mempunyai nilai ekstrim) akan dapat digambarkan bagaimana kurva hubungan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran.



Dari hasil penggambaran diagram sebaran antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia, terlihat bahwa hasilnya menunjukkan kecenderungan yang sesuai dengan gambaran Kurva Phillips.

D. Penutup

Tiga masalah utama dan mendasar dalam perekonomian Indonesia secara makro ekonomi adalah persoalan ketenagakerjaan atau pengangguran dan inflasi yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah dan belum berkualitas. Penanggulangan atau kebijakan pada dua masalah ini pun tidak dapat diprioritaskan mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu, semuanya bergantung pada kondisi struktural perekonomian⁶.

Kurva Phillips tidak berlaku di Indonesia karena inflasi di Indonesia tidak disebabkan oleh permintaan agregat melainkan kenaikan harga, misalnya akibat kenaikan BBM. Selain itu kebanyakan perusahaan di Indonesia menerapkan padat modal bukan padat karya, sehingga pertumbuhan lapangan kerja lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Suatu perekonomian negara dikatakan baik jika pada suatu ketika tingkat inflasi dan pengangguran yang terjadi lebih rendah dibanding tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk memecahkan masalah inflasi sebagai penyebab terjadinya ketidakstabilan harga dan untuk memecahkan masalah pengangguran. Jadi kebijakan ekonomi makro harus dapat mencapai sasarannya, yaitu menciptakan stabilitas harga dan dalam waktu bersamaan menciptakan kesempatan kerja.

⁶ Dr. Hendri Saparini dalam diskusi dengan pakar tanggal 16 Juli 2014.

Penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional sesuai pasal 27 ayat 2 UUD 1945 bahwa setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang artinya produktif dan remuneratif. Untuk itu diperlukan dua kebijakan yaitu kebijakan makro dan mikro. Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan penanganan pengangguran antara lain kebijakan moneter terkait uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya dalam setiap rapat-rapat kabinet harus lebih fokus pada masalah penanggulangan pengangguran. Kebijakan mikro (khusus) yang berkaitan erat dengan penanganan pengangguran antara lain

- Pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia memiliki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal.
- Segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi.
- Segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok. **(HH)**